

# RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Windu Nomor 26, Bandung [dpmptsp.jabarprov.go.id](http://dpmptsp.jabarprov.go.id)

 DinasPMPTSPProvJabar



dinasmptsp.jabar



dpmptspjabar



2021

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 disusun dalam rangka pedoman pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan Dinas PMPTSP pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2021.

Rencana Kerja ini berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan good governance, serta sebagai sarana meningkatkan kinerja Dinas PMPTSP secara bertahap dan berkesinambungan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 dilandasi oleh tugas dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas Unit Kerja dan Tata Cara Kerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi ijin dan non ijin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, akuntabel dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2021

Bandung, Agustus 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT,**

**NONENG KOMARA NENGSIH, SE., MAP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660911 199402 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN 2020 .....	9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	9
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	24
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH .....	27
2.4 REVIEW TERHADAP RKPD PROVINSI JAWA BARAT .....	30
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	33
3.1    TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	33
3.2    TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	35
3.3    PROGRAM DAN KEGIATAN .....	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	47
BAB V PENUTUP .....	51

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah diharuskan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Sementara itu, dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah juga perlu berpedoman kepada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu

dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang

disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 juga mengacu kepada Renstra Perubahan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Selain itu, dalam penyusunan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 juga mengacu kepada Rencana Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yaitu untuk merumuskan program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja, sesuai dengan tugas, fungsi dan rincian tugas unit dan tata kerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Sementara, tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai VISI MISI Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratiran Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahsekurang-kurangnya disusun menurut sistimatika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan



Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APDB tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyerenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tanyangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.2. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menjelaskan perumusan kegiatan prioritas tahun 2021, kegiatan antar Perangkat Daerah Provinsi, serta rencana pendanaan berdasarkan pagu indikatif.

## **BAB V. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN 2020

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi oleh Bappeda ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Memasuki tahun pertama pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah.

Tujuan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yaitu “Meningkatnya Investasi Berkualitas Berkelanjutan”. Tujuan tersebut dijabarkan kembali ke dalam dua sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Realisasi Investasi
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan Publik

Kedua sasaran dimaksud, dapat dicapai oleh 5 (lima) program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan pada tahun 2019. Dalam mencapai sasaran meningkatnya

realisasi investasi dilaksanakan melalui satu program, sedangkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan publik dilaksanakan melalui empat program. Pencapaian kinerja dan anggaran Tahun 2019 dalam mencapai sasaran secara lebih lengkap disajikan dalam Table 2.1.

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Rp.107,00 -115,06 T	Rp 137,5 T	119,5	4.011.429.914	3.649.007.661	91
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan Publik	78 %	81,26 %	104	31.870.118.998	29.473.731.274	92

Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program mencapai 88,79 persen dengan rata-rata capaian perprogram sebesar 88,67 persen. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar Rp 33.122.738.938 atau mencapai 92,31 persen dari keseluruhan pagu anggaran belanja langsung. Pencapaian tersebut didorong oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan dan penganggaran yang sesuai
2. Dukungan dari Tim Teknis untuk peningkatan pelayanan perizinan
3. Komitmen yang kuat dan kerjasama yang baik antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan

Namun terdapat juga beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 antara lain kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan, kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan

program/kegiatan dan penganggaran, komponen *e-budgeting* yang terlalu detail membuat pelaksanaan kegiatan tidak fleksibel.

Table 2.1  
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan  
Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (rupiah)	REALISASI	
			ANGGARAN	%
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Investasi Daerah</b>	<b>4,011,429,914</b>	<b>3,649,007,661</b>	<b>91</b>
1	Pembuatan/Produksi Audio Visual dan Placement ILM Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Media Elektronik dan Media Sosial	149,999,836	148,711,822	99
2	Fasilitasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99,859,809	90,212,693	90
3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	149,444,282	144,960,943	97
4	Kegiatan Penyusunan Bahan, Sarana dan Prasarana Promosi PMPTSP	196,179,555	185,268,430	94
5	Kegiatan Pelaksanaan Promosi PMPTSP	1,022,409,877	913,228,692	89
6	Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Usaha PMPTSP	148,916,975	129,555,461	87
7	Kegiatan Penyusunan Regulasi PMPTSP	598,755,380	525,088,578	88
8	Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Potensi Peluang Investasi yang Diminati Investor	99,365,057	87,904,548	88
9	Penanganan Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat	199,991,672	185,485,522	93
10	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat	249,993,164	240,588,552	96
11	Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat	299,995,387	275,327,387	92
12	Kegiatan Rekonsiliasi Data Penanaman Modal dan Pelayanan Teradu Satu Pintu	149,997,041	139,153,250	93
13	Pelaksanaan Promosi Melalui Media Elektronik ("Business Corner" Talkshow)	99,516,649	88,815,680	89
14	Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Investment Marketplace	247,647,864	215,993,868	87
15	Kegiatan Promosi Media Sosial, Email Marketing, dan E-Newsletter	149,987,374	140,950,235	94
16	Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Peluang Investasi di Jawa Barat	149,342,990	137,762,000	92
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>5,616,717,935</b>	<b>5,425,259,284</b>	<b>97</b>
1	Pembuatan Bahan/Data Cetak terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99,999,894	94,719,000	95

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (rupiah)	REALISASI	
			ANGGARAN	%
2	Pelaksanaan Pengawasan Pasca Penerbitan Izin/Non Izin Sektoral	149,997,400	148,932,520	99
3	Monitoring Proses Penerbitan Izin/Non Izin Sektoral	99,993,933	97,824,458	98
3	Penanganan Proses Permasalahan Perizinan	199,999,480	167,531,950	84
4	Peninjauan Lapangan Bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1,499,687,373	1,476,496,788	98
5	Rapat Berkala Teknis Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	99,752,784	80,761,855	81
6	Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial	1,453,999,528	1,488,555,180	102
7	Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	40,000,000	13,715,050	34
8	Kegiatan Pengembangan Integrasi Data Dengan Sistem Aplikasi Lainnya	599,999,918	589,132,200	98
9	Kegiatan Forum Replikasi dan Monitoring Sistem Aplikasi	99,969,780	92,239,710	92
10	Pengembangan Sistem Call Center Pelayanan Perizinan	499,980,350	487,176,850	97
11	Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penanaman Modal dan Perizinan Pada Aplikasi SIMPATIK	99,982,462	94,965,000	95
12	Kegiatan Pembuatan Sistem Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat	99,966,289	98,683,750	99
13	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	285,516,460	279,548,000	98
14	Kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan	187,872,412	185,871,000	99
15	Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Kearsipan	99,999,872	69,105,973	69
<b>III</b>	<b>Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>1,342,803,990</b>	<b>1,199,518,190</b>	<b>89</b>
1	Kegiatan Evaluasi Data, Pelaporan Investasi dan Perizinan	221,107,576	213,042,750	96
2	Forum Perangkat Daerah	233,711,819	231,792,836	99
3	Kegiatan Penyelenggaraan Forum Perencanaan Tingkat Daerah (Pra Musrenbang, Musrenbang, Musrenbangnas, Pertemuan Regional dan Nasional)	366,427,400	280,680,174	77
4	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Dinas PMPTSP	46,052,500	46,030,192	100
5	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2020	89,992,800	68,407,812	76
6	Penyelenggaraan Pameran Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	57,355,860	55,483,900	97

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (rupiah)	REALISASI	
			ANGGARAN	%
7	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	53,948,257	42,480,329	79
8	Penatausahaan Keuangan dan Aset Dinas PMPTSP	79,933,696	79,879,550	100
9	Musyawaharah Koordinasi Teknis Kerjasama 3 Provinsi	194,274,082	181,720,647	94
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>2,800,838,753</b>	<b>2,702,943,920</b>	<b>97</b>
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PMPTSP	2,800,838,753	2,702,943,920	97
<b>V</b>	<b>Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>22,109,758,320</b>	<b>20,146,009,880</b>	<b>91</b>
1	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor	2,491,606,471	2,297,712,090	92
2	kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya	1,753,967,152	1,605,978,554	92
3	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	420,000,000	357,539,091	85
4	Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Dinas PMPTSP	7,018,785,000	6,737,418,500	96
5	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor	3,463,071,910	3,063,018,221	88
6	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga Serta Pakaian Aparatur	997,900,000	956,561,300	96
7	Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	412,500,000	304,950,000	74
8	Kegiatan Penyediaan Langgan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai	2,879,101,164	2,411,496,390	84
9	Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Dinas PMPTSP	679,410,280	606,225,000	89
10	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor	1,993,416,343	1,805,110,734	91
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>35,881,548,912</b>	<b>33,122,738,935</b>	<b>92</b>

Adapun rekomendasi/saran sebagai tindak lanjut evaluasi hasil dari Bappeda Provinsi Jawa Barat bagi pelaksanaan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yaitu perlu mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran dan merumuskan komponen *e-budgeting* yang fleksibel dalam pelaksanaan kegiatan.



Dalam Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 terdapat perbedaan program/kegiatan pada tahun 2019 dengan tahun 2020, dimana program/kegiatan pada tahun 2019 berjumlah 5 program dan 52 kegiatan. Sementara itu, sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri agar setiap bidang pada Perangkat Daerah memiliki satu program yang kinerjanya dapat terukur. Oleh karenanya, pada tahun 2020 Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat memiliki 9 program dan 52 kegiatan, dimana 2 program merupakan program yang bersifat *fixed cost*. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dan pencapaian Renstra Dinas PMPTSP sampai dengan Tahun 2020 disajikan secara lengkap pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2020  
Provinsi Jawa Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
<b>1</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib</b>									
<b>1</b>	<b>Bidang Urusan Penanaman Modal</b>									
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Investasi Daerah</b>	<b>Jumlah Perusahaan PMA-PMDN yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM</b>								
001	Pembuatan/Produksi Audio Visual dan Placement ILM Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Media Elektronik dan Media Sosial	Jumlah ILM	1 Produk/Tayangan	-	1	1	100%	-	-	-
002	Fasilitasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP	15 Kali	-	15	14	93%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
003	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	2 Kali	-	2	2	100%	-	-	-
004	Kegiatan Penyusunan Bahan, Sarana dan Prasarana Promosi PMPTSP	Jumlah Bahan Sarana Prasarana Promosi	2 Paket	-	2	2	100%	-	-	-
005	Kegiatan Pelaksanaan Promosi PMPTSP	Laporan Hasil Pelaksanaan Promosi	1 Kegiatan	-	1	1	100%	-	-	-
006	Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Usaha PMPTSP	Jumlah Kesepakatan	3 Dokumen MoU/LoI	-	3	3	100%	-	-	-
007	Kegiatan Penyusunan Regulasi PMPTSP	Jumlah Regulasi	1 Dokumen	-	1	1	100%	-	-	-
008	Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Potensi Peluang Investasi yang Diminati Investor	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	27 Kab/Kota	-	27	24	89%	-	-	-
009	Penanganan Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi Penanganan Permasalahan Penanaman Modal dalam rangka Realisasi Investasi	50 Perusahaan	-	50	46	92%	-	-	-
010	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan	100 Perusahaan	-	100	96	96%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
011	Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pemantauan dan/atau Pembinaan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 Perusahaan	-	200	184	92%	-	-	-
012	Kegiatan Rekonsiliasi Data Penanaman Modal dan Pelayanan Teradu Satu Pintu	Data Penanaman Modal dan PTSP	20 Sektor	-	20	19	95%	-	-	-
013	Pelaksanaan Promosi Melalui Media Elektronik ("Business Corner" Talkshow)	Jumlah Pelaksanaan Business Talkshow	1 Media Elektronik	-	1	1	100%	-	-	-
014	Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Investment Marketplace	Aplikasi Media Promosi Digital	1 Aplikasi	-	1	1	100%	-	-	-
015	Kegiatan Promosi Media Sosial, Email Marketing, dan E-NewsLetter	Tersebaranya Rich/Engagement Peluang Investasi di Media Digital	1000 Rich/Engagement	-	1000	940	94%	-	-	-
016	Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Peluang Investasi di Jawa Barat	Kajian Prospektus Investasi di Jawa Barat	1 Dokumen	-	1	1	100%	-	-	-
<b>1.18.011.07</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>Presentase Penyelesaian Izin Tepat Waktu</b>	<b>40 Persen</b>	-	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
001	Pembuatan Bahan/Data Cetak Terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Bahan Cetak	2 Bahan Cetak	-	2	2	100%	-	-	-
002	Pelaksanaan Pengawasan Pasca Penerbitan Izin/Non Izin Sektoral	Jumlah Objek Pemilik Izin yang Dilakukan Pengawasan Ketentuan Sektoral	50 Objek Izin	-	50	50	100%	-	-	-
003	Monitoring Proses Penerbitan Izin/Non Izin Sektoral	Jumlah Pemohon Perizinan/Komitmen yang dilakukan Pemantauan Proses Perizinan	50 Pemohon Izin	-	50	49	98%	-	-	-
004	Penanganan Proses Permasalahan Perizinan	Jumlah Fasilitas Pengaduan yang menjadi permasalahan perizinan	100 Permasalahan	-	100	84	84%	-	-	-
005	Peninjauan Lapangan Bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Peninjauan Lapangan yang dilaksanakan	520 Kali	-	520	512	98%	-	-	-
006	Rapat Berkala Teknis Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Rapat yang Dilaksanakan	1200 Kali	-	1200	972	81%	-	-	-
007	Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial	Jumlah Peninjauan Lapangan yang dilaksanakan	400 Kali	-	400	399	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
008	Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	Jumlah Rapat yang Dilaksanakan	700 Kali	-	700	240	34%	-	-	-
009	Kegiatan Pengembangan Integrasi Data Dengan Sistem Aplikasi Lainnya	Sinkronisasi Data Terstruktur	1 Database	-	1	1	100%	-	-	-
010	Kegiatan Forum Replikasi dan Monitoring Sistem Aplikasi	Tingkat Keselarasan Aplikasi yang direplikasi	1 Kegiatan	-	1	1	100%	-	-	-
011	Pengembangan Sistem Call Center Pelayanan Perizinan	Jumlah Informasi Pengaduan Masyarakat Melalui Call Center	2500 orang	-	2500	2436	97%	-	-	-
012	Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penanaman Modal dan Perizinan Pada Aplikasi SIMPATIK	Modul Aplikasi Pelaporan	1 Aplikasi	-	1	1	100%	-	-	-
013	Kegiatan Pembuatan Sistem Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat	Aplikasi SKM	2 Aplikasi	-	2	2	100%	-	-	-
014	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen	-	2	2	100%	-	-	-
015	Kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan	Kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan	1 Dokumen	-	1	1	100%	-	-	-
016	Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Kearsipan	Data Arsip Digital	8000 Data	-	8000	5528	69%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
<b>1.18.1.18</b>	<b>Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas PMPTSP</b>	<b>100 Persen</b>	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	-	-	-
001	Kegiatan Evaluasi Data, Pelaporan Investasi dan Perizinan	Jumlah Dokumen Data Pelaporan Investasi dan Perizinan	5 Dokumen	-	5	5	100%	-	-	-
002	Forum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Forum Perangkat Daerah	1 Kali	-	1	1	100%	-	-	-
003	Kegiatan Penyelenggaraan Forum Perencanaan Tingkat Daerah (Pra Musrenbang, Musrenbang, Musrenbangnas, Pertemuan Regional dan Nasional)	Jumlah Forum Perencanaan	10 Kali	-	10	8	80%	-	-	-
004	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Dinas PMPTSP	Pelaksanaan Monitoring Program/Kegiatan	1 Tahun	-	1	1	100%	-	-	-
005	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2020	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	-	6	5	83%	-	-	-
006	Penyelenggaraan Pameran Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Penyelenggaraan Pameran LKPJ	1 Kali	-	1	1	100%	-	-	-
007	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen yang dihasilkan	8 Dokumen	-	8	6	75%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
008	Penatausahaan Keuangan dan Aset Dinas PMPTSP	Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	-	1	1	100%	-	-	-
009	Musyawarah Koordinasi Teknis Kerjasama 3 Provinsi	Terselenggaranya Kegiatan Musyawarah Koordinasi Teknis Kerjasama 3 Provinsi	1 Kali	-	1	1	100%	-	-	-
<b>1.18.1.19</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Dinas PMPTSP</b>	100 Persen	-	100	100	<b>100%</b>	-	-	-
001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PMPTSP	Penyediaan Kegiatan dan Kebutuhan Rohani, Sarana Olahraga dan Pakaian Dinas	12 Bulan	-	12	12	100%	-	-	-
<b>1.18.1.19</b>	<b>Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>Persentase Pegawai yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan Sesuai Peraturan Perundang-undangan Lingkup Dinas PMPTSP</b>	70 Persen	-	70	70	<b>100%</b>	-	-	-
001	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor	12 Bulan	-	12	12	100%	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
002	kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya	Penyediaan Tenaga Keamanan, Kebersihan dan Peralatannya	12 Bulan	-	12	12	100%	-	-	-
003	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	54 Kendaraan	-	54	46	85%	-	-	-
004	Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Dinas PMPTSP	Renovasi Gedung Kantor Dinas PMPTSP	1 Gedung	-	1	1	100%	-	-	-
005	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor	Pelaksanaan Rapat Internal dan Luar Kantor Penyediaan Perjalanan Dinas	12 Bulan	-	12	12	100%	-	-	-
006	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga Serta Pakaian Aparatur	Penyediaan Kegiatan dan Kebutuhan Rohani, Sarana Olahraga dan Pakaian Dinas	12 Bulan	-	12	12	100%	-	-	-
007	Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	Jumlah Peserta Diklat/Kursus Singkat/Bimtek Aparatur	150 Orang	-	150	111	74%	-	-	-
008	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai	Tersedianya Kebutuhan Langganan Kantor	12 Bulan	-	12	12	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
009	Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Dinas PMPTSP	Jumlah Aparatur Dinas PMPTSP yang Lulus Diklat dengan Predikat minimal Memuaskan	130 Orang	-	130	116	89%	-	-	-
010	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor	Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	-	12	12	100%	-	-	-

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, serta pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugas. Sementara itu, fungsi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, antara lain:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan pengelolaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan Administrasi Dinas;
4. Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan Fungsi Lain Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 memuat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat terdapat tujuan dari misi ke 4 (empat) yaitu “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Mengurangi Disparitas” dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi” dengan indikator tujuan/sasaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB. Adapun strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan meningkatkan investasi daerah.

Maka dengan mengacu kepada hal tersebut, dalam Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkan, indikator kinerja kunci Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu nilai realisasi investasi dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

Capaian kinerja pelayanan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 terkait dengan nilai realisasi investasi mencapai Rp 137,5 triliun dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 88,22 triliun dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 49,28 triliun. Realisasi investasi PMA dan PMDN pada Januari - Desember tahun 2019 sebesar Rp137.499.840.823.822,- naik Rp. 20.536.469.502.045 dari tahun 2018 periode yang sama, yang sebesar Rp 116.963.371.321.776 Sudah 112,89 % atau melebihi dari target nasional sebesar Rp. 121,80 T. Sementara itu, jumlah penyerapan tenaga kerja sampai pada tahun 2019 sebanyak 130.704 orang.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada tahun 2019 adalah 81,62 dengan peringkat mutu pelayanan “B” dan kategori pelayanan “BAIK”. Nilai realisasi IKM pada tahun 2019 berada jauh diatas target yang telah ditetapkan sebesar 78. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan pada tahun 2019 didorong oleh beberapa hal sebagai berikut yaitu Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori PRIMA (Nilai A) dan sebagai Unit Kerja Pelayanan Dengan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kemenpan RB. Selain itu juga, penyelenggaraan perizinan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat telah memperoleh sertifikasi Standar Internasional ISO 9001:2015 pada tahun 2019. Dengan pencapaian-pencapaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat kedepannya.

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Jawa Barat**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
					Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021*	Th. 2022	Th. 2023	
1	Nilai Realisasi Investasi	N/A	N/A	Triliun Rupiah	107,00	99,00	101,97	105,00	109,20	137,5	120,4	72,46			Selalu Melebihi Target
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan	N/A	N/A	Poin	78	79	80	81	82	81.62	85,36	86,17			Mutu Pelayanan "B"

### 2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Salah satu tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah melakukan pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam rangka meningkatkan investasi untuk mendorong perekonomian nasional. Pemerintah pusat menengarai bahwa rendahnya nilai investasi di Indonesia diakibatkan oleh berbelitnya prosedur perizinan di berbagai sektor sehingga memandang perlu adanya pembenahan perundang-undangan untuk menghapus kerumitan pelayanan perizinan. Akhirnya, di bulan November 2020 pemerintah pusat mensahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*).

Turunan dari undang-undang tersebut berupa 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden dimana 2 peraturan pemerintah telah dimandatkan pada Kementerian Dalam Negeri berupa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kedua PP tersebut memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Peralihan Perizinan Berusaha di Daerah, Penyusunan Perda/Perkada tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk berdiri sendiri dan non tipologi, Penyusunan Perda/Perkada tentang Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang, Penyusunan Perkada pendelegasian kewenangan Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Penetapan dan pelantikan jabatan struktural dan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui penerapan Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Assessment* (OSS RBA). Penerapan sistem OSS RBA diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan

perizinan dengan mengurangi proses birokrasi sehingga mempermudah para pelaku usaha untuk mendapatkan izin berusaha di Indonesia dengan membagi perizinan sesuai dengan tingkat risiko dari pelaku usaha.

Isu penting lainnya adalah pandemi covid-19 yang masih melanda berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia, mengakibatkan penurunan investasi dan mundurnya perekonomian nasional dan regional sehingga perlu adanya penyesuaian dalam hal pendanaan untuk pengalihan anggaran dari program dan kegiatan yang ada kepada sektor kesehatan yaitu penanganan covid-19. Kemudian, pandemi ini juga mendorong terjadinya perubahan tata cara dalam hal bekerja sesuai Adaptasi Kebiasaan Baru dengan mengedepankan digitalisasi pekerjaan di semua sektor.

Digitalisasi sistem pelayanan perizinan diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang pada akhirnya dapat mendongkrak daya saing Indonesia. Daya saing suatu daerah merupakan hal yang sangat penting bagi investor untuk menentukan keputusan berinvestasi. Investor cenderung akan memilih daerah yang lingkungan bisnis dengan kebijakan yang ramah, sehingga menjadikan investor menanam investasinya dengan risiko yang dapat dikelola dan terkontrol. Sehingga pada akhirnya dengan perbaikan sistem perizinan diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini dirasa masih belum cukup untuk mewujudkan realisasi penanaman modal sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah daerah terkait sistem OSS baik dalam regulasi maupun sistemnya.

Adapun beberapa isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan antara lain:

1. Masih merebaknya pandemi covid-19 yang membuat menurunnya laju pertumbuhan perekonomian Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jawa Barat pada khususnya. Sehingga berimbas pada menurunnya investasi baik PMA maupun PMDN.

2. Adanya pergeseran anggaran (*refocussing*) dari program dan kegiatan yang dianggap tidak terlalu *urgent* untuk kemudian dialihkan kepada penanganan covid-19 membuat perlunya penyesuaian dari target dan capaian kinerja dinas.
3. Implementasi undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 2 November 2020. Undang-undang juga dikenal sebagai Omnibus Law ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem investasi yang berkualitas dan berdaya saing. Tindak lanjut dari omnibus Law ini di pemerintah daerah adalah segera menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait dengan penyelenggaraan perizinan di daerah;
4. Mendorong pemerintah dalam hal sinergitas antara Kementerian/Lembaga dengan daerah dalam mewujudkan deregulasi pelayanan perizinan baik berupa NSPK dengan melibatkan pemerintah daerah.
5. Penyederhanaan birokrasi di pemerintah daerah yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka debirokratisasi pelayanan perizinan akan segera dilakukan karena berimbas pada kelembagaan PTSP di daerah;
6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* berbasis risiko atau *OSS Risk Based Assessment* akan dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga perlu ada penyesuaian di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
7. Meningkatkan optimalisasi dan sinkronisasi peran perencanaan dan pengembangan potensi penanaman modal dari BKPM terhadap daerah dalam bentuk program dekonsentrasi yang nyata sehingga potensi dan realisasi penanaman modal di daerah dapat optimalkan dengan baik.



## 2.4 REVIEW TERHADAP RKPD PROVINSI JAWA BARAT

Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Perangkat Daerah (PD).

Mengacu kepada rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat, program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 terdiri dari 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut disusun dalam rangka pencapaian tujuan dari Misi ke 4 Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Mengurangi Disparitas Ekonomi” dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi”.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP Provinsi Tahun 2021 berdasarkan hasil analisis kebutuhan terdiri dari 6 (enam) program, antara lain:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan,
2. Program Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan,
3. Program Pelayanan Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan,
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan,
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan,

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan,

Program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sehingga terdapat perbedaan dengan nomenklatur pada tahun-tahun sebelumnya.

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Setelah pengimplementasian Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran secara online di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah di Kabupaten/Kota, anggota dewan dan masyarakat umum dapat secara langsung mengusulkan program dan kegiatan untuk perangkat daerah. Hasil usulan tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil Forum Musrenbang Kabupaten/Kota terdapat beberapa usulan langsung kepada Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Sebagian besar usulan terkait dukungan pembangunan terhadap pembangunan Mall Pelayanan Publik di beberapa Kabupaten/Kota. Adapun usulan-usulan tersebut tersaji pada Tabel 2.5 di halaman berikutnya

Tabel 2.5  
Usulan Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten/Kota di Jawa Barat

<b>No</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kabupaten Purwakarta	Pengembangan sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta	RAB sudah ada
2	Kota Depok	Pembangunan gedung MPP	-
3	Kabupaten Majalengka	Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik	-
4	Kabupaten Bandung Barat	Pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik dan Penataan Ruang Pelayanan dan Ruang Kantor Dinas PMPTSP Kabupaten Bandung Barat	DED dan RAB sudah ada
5	Kabupaten Garut	Pembangunan Sistem Informasi Mall Pelayanan Publik	RAB sudah ada
6	Kabupaten Pangandaran	Pembangunan gedung MPP	DED dan RAB sudah ada

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2020 – 2024 yang merupakan tema pembangunan tahun 2020 – 2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM telah menetapkan dua arah kebijakan dan startegi yang akan dilakukan pada masing-masing arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra BKPM Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (*investor needs*)
  - b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
  - c. Meningkatkan efektivitas kerjasama penanaman modal
  - d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal
  - e. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal
  - f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
  - g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020 – 2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
  - b. Meningkatkan produktivitas penanaman modal
  - c. Meningkatkan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
  - d. Meningkatkan daya saing dan akses pasar
  - e. Meningkatkan penanaman modal pada industry yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor
  - f. Meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar
  - g. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya alam di dalam negeri

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023. Mengacu kepada Renstra Dinas PMTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat selama lima tahun mendatang yaitu meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui peningkatan laju pertumbuhan investasi PMA dan PMDN. Sementara itu, sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 yaitu 1) Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN dan 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan Publik.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat telah merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana telah tertuang di dalam Renstra Dinas PMTPSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023. Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Mengembangkan potensi dan peluang investasi;
2. Memberikan kemudahan berinvestasi di Jawa Barat;
3. Meningkatkan efektivitas sinergi dan upaya promosi investasi;
4. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan fasilitasi penanganan permasalahan penanaman modal;
5. Peningkatan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM;
6. Membuat regulasi teknis pelaksanaan pelayanan pengelolaan izin-izin strategis;
7. Menerapkan pola *online system* dalam memberikan pelayanan perizinan;
8. Meningkatkan sinergitas dengan Perangkat Daerah teknis;
9. Meningkatkan kualitas aparatur PTSP;
10. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan perizinan

Arah kebijakan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan realisasi investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk lima tahun mendatang, antara lain:

1. Mengoptimalkan fungsi pemusatan basis data potensi investasi dan pengolahan informasi peluang investasi;
2. Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah;
3. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Jawa Barat melalui berbagai media;
4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA & PMDN;
6. Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan secara paralel;
7. Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait;
9. Pemenuhan sumber daya aparatur sesuai dengan standar kompetensi dan peningkatan kapasitas;
10. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan perizinan.

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dan sebagai bagian dari pencapaian MISI ke empat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu **“Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat – Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan”**. Selain itu, dengan mengacu kepada Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2021 Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan 6 (enam) program yang diterjemahkan ke dalam 10 kegiatan dan 42 Sub

Kegiatan. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 secara lebih lengkap disajikan pada tabel 3.1.



Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2022  
Provinsi Jawa Barat

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.18	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>								
2.18.02	<b>Program Pengembangan IKlim Penanaman Modal</b>								
2.18.02.1.01	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>								
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Regulasi PMPTSP di Jawa Barat			Rp. 481.353.000	APBD			
2.18.02.1.02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>								
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi				Rp. 3.332.594.000	APBD			
2.18.03	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>								

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.18.03.1.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>								
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				Rp. 642.810.000	APBD			
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				Rp. 3.242.352.000	APBD			
<b>2.18.04</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>								
2.18.04.1.01	<b>Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>								
2.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Pemohon yang Terlayani			Rp. 1.000.000.000	APBD			
2.18.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				Rp. 300.000.000	APBD			
2.18.04.1.02	<b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>								

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Pemohon yang Terlayani			Rp. 2.000.000.000	APBD			
2.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				Rp. 300.000.000	APBD			
<b>2.18.05</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>								
2.18.05.1.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>								
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				Rp. 1.376.470.000	APBD			
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				Rp. 1.124.397.200	APBD			
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				Rp. 1.225.437.200	APBD			
<b>2.18.06</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>								
2.18.06.1.01	<b>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman</b>								

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<b>Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b>								
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				Rp. 2.988.469.000	APBD			
<b>x.x.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
x.xx.01.1.01	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								
x.xx.01.1.01.1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Evaluasi Dokumen Renstra Dinas PMPTSP Tahun 2018-2023 dan Renja Dinas PMPTSP 2022			Rp. 200.000.000	APBD			
x.xx.01.1.01.2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan			Rp. 110.000.000	APBD			
x.xx.01.1.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Forum Perencanaan Tingkat Daerah			Rp. 550.000.000	APBD			
x.xx.01.1.01.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Pameran LKPJ			Rp. 88.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan</b>								
x.xx.01.1.02.4	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dokumen penatausahaan Keuangan			Rp. 110.000.000	APBD			
x.xx.01.1.02.6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan			Rp. 99.000.000	APBD			
x.xx.01.1.03	<b>Administrasi Umum</b>					APBD			
x.xx.01.1.03.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Surat Menyurat			Rp. 34.800.000	APBD			
x.xx.01.1.03.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air, listrik dan internet kantor			Rp. 1.422.000.000	APBD			
x.xx.01.1.03.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Rp. 2.850.439.000	APBD			
x.xx.01.1.03.6	penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya belanja kir dan belanja pajak kendaraan bermotor roda 4 & 2 selama 1 tahun			Rp. 42.000.000	APBD			
x.xx.01.1.03.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyelenggaraan Jasa Konsultasi Penilai Aset			Rp. 100.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01.1.03.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keamanan dan kebersihan sarana dan prasarana selama 1 tahun			Rp. 2.584.800.000	APBD			
x.xx.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun			Rp. 480.000.000	APBD			
x.xx.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun			Rp. 1.084.000.000	APBD			
x.xx.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor selama 1 tahun			Rp. 180.000.000	APBD			
x.xx.01.1.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, alat dan bahan kebersihan selama 1 tahun			Rp. 408.000.000	APBD			
x.xx.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makan dan minum guna mendukung kebutuhan operasional DPMPSTP selama 12 tahun			Rp. 1.055.000.000	APBD			
x.xx.01.1.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terciptanya koordinasi dan			Rp. 1.640.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Konsultasi ke luar dan dalam daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan							
x.xx.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya penyelenggaraan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Rp. 1.165.000.000	APBD			
x.xx.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya penyelenggaraan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Rp. 3.020.000.000	APBD			
x.xx.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor selama 1 tahun			Rp. 2.800.600.000	APBD			
x.xx.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Operasional yang Nyaman dan selalu dalam kondisi laik jalan			Rp. 590.000.000	APBD			
x.xx.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung			Rp. 1.855.000.000	APBD			

Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Kantor selama 1 tahun							
x.xx.01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terlaksananya penyelenggaraan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur selama 1 tahun			Rp. 187.500.000	APBD			
x.x.01.1.04	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>								
x.xx.01.1.04.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya dalam 1 tahun			Rp. 187.500.000	APBD			
x.xx.01.1.04.3	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dalam 1 tahun			Rp. 150.000.000	APBD			
x.xx.01.1.04.4	Pengadaan Pakaian Korpri	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Korpri dalam 1 tahun anggaran			Rp. 112.500.000	APBD			
x.xx.01.1.04.5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Terlaksananya penyelenggaraan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dalam 1 tahun			Rp. 495.000.000	APBD			



Kode	Urusan/Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
x.xx.01.1.04.9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya kegiatan outbond dan family gathering sesuai dengan yang direncanakan			Rp. 666.000.000	APBD			
x.x.01.1.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan				Rp. 1.300.000.000	APBD			

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rancangan Awal Renstra BKPM Tahun 2020 – 2024, RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 dan Hasil evaluasi Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Dengan mengacu hal-hal tersebut di Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat telah merumuskan 6 (enam) program, 10 kegiatan dan 42 sub kegiatan, beserta kerangka pendanaan indikatif. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat yaitu meningkatnya realisasi investasi dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan publik.

Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat juga telah merumuskan kegiatan unggulan / prioritas yang akan menjadi fokus pelaksanaan kegiatan di tahun 2021. Adapun kegiatan unggulan/prioritas Dinas PMTPSP Provinsi Jawa Barat tahun 2021, antara lain:

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Rencana program, kegiatan dan kerangka pendanaan indikatif Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rupiah)</b>
<b>1</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>	<b>18.013.882.400</b>
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>3.813.947.000</b>
1.1	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	481.353.000
1.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	481.353.000
1.2	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>	3.332.594.000
1.2.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	3.332.594.000
<b>2</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>3.885.162.000</b>
2.1	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	3.885.162.000
2.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	642.810.000
2.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	3.242.352.000
<b>3</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>3.600.000.000</b>
3.1	<b>Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	1.300.000.000
3.1.1	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	1.000.000.000
3.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	300.000.000
3.2	<b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	2.300.000.000
3.2.1	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	2.000.000.000
3.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	300.000.000
<b>4</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>3.726.304.400</b>
4.1	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	3.726.304.400
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.376.470.000
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.124.397.200

NO	Program / Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rupiah)
4.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.225.437.200
<b>5</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>2.988.469.000</b>
5.1	<b>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>2.988.469.000</b>
5.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.988.469.000
<b>6</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>25.567.139.000</b>
6.1	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	948.000.000
6.1.1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	200.000.000
6.1.2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	110.000.000
6.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	550.000.000
6.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.000.000
6.2	<b>Administrasi Keuangan</b>	209.000.000
6.2.1	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	110.000.000
6.2.2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99.000.000
6.3	<b>Administrasi Umum</b>	21.499.139.000
6.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.800.000
6.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.422.000.000
6.3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.850.439.000
6.3.4	penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	42.000.000
6.3.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100.000.000
6.3.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.584.800.000
6.3.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	480.000.000
6.3.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.084.000.000
6.3.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	180.000.000
6.3.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	408.000.000
6.3.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.055.000.000
6.3.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.640.000.000
6.3.13	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.165.000.000

<b>NO</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rupiah)</b>
6.3.14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3.020.000.000
6.3.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.800.600.000
6.3.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	590.000.000
6.3.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.855.000.000
6.3.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	187.500.000
6.4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.911.000.000
6.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	187.500.000
6.4.2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	150.000.000
6.4.3	Pengadaan Pakaian Korpri	112.500.000
6.4.4	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	495.000.000
6.4.5	Pendidikan dan Pelatihan Formal	666.000.000
6.4.6	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	1.300.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>43.581.021.400</b>

## BAB V PENUTUP

Penyusunan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Mendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dinas pada tahun mendatang. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan – kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan diantara semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dan Tim Teknis, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, secara sinergitas dan terintegrasi.
2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yang berdasarkan kepada laporan hasil evaluasi dari seluruh Bidang dan Sekretariat. Hasil evaluasi, kajian dan analisis Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 menjadi bahan dasar penyusunan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.
3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2021, Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021.
4. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integritas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2021, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi

yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas, melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan serta Sub Bagian Keuangan dan Aset.

5. Secara proaktif, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, wajib melakukan monitoring dan mengkaji pelaksanaan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 serta menghimpun dan menganalisis laporan evaluasi Renja setiap 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasil evaluasi Renja kepada Kepala Dinas.
6. Pada akhir tahun anggaran 2021, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan serta Sub Bagian Keuangan dan Aset.
7. Renja Perubahan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT,

NONENG KOMARA NENGSIH, SE., MAP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660911 199402 2 001